



Manajemen Sistem Kredit Semester untuk Mengoptimalkan Perkembangan Potensi Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas

Kinanthi Puspa Riani*, Achmad Supriyanto, Wildan Zulkarnain

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: kinanthi.puspariani@yahoo.com

Paper received: 5-3-2022; revised: 19-3-2022; accepted: 24-3-2022

Abstract

The purpose of this study is to provide information management of semester credit system at senior high school. This research used the qualitative approach with case studies. Data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The process of data analysis are data condensation, data display, and conclusion drawing/verifications. The results of this study: (1) SKS refers to the constitution of Sisdiknas law number 20 of 2003 and Permendikbud law number 158 of 2014, (2) Deputy head of curriculum do the mapping on selection of students through academic and psychological test, (3) formed the team of SKS, (4) learning in the form of groups and minimize methods lectures, (5) intercultural learning through evaluation review teacher, supervision by means of face to face, and the implementation of the exam for students, (6) found a distribution in UKBM too late and (7) be solved by training or workshop, (8) the output of the program among other students are able to graduate within two years and be able to compete to get into college.

Keywords: management; semester credit system at senior high school

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi manajemen SKS di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dengan data *condensation*, data *display*, dan *conclusion drawing/verifications*. Hasil penelitian ini: (1) SKS mengacu pada UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014, (2) Waka Kurikulum melakukan pemetaan pada seleksi peserta didik melalui tes akademik dan psikologi, (3) terbentuk tim penanggungjawab SKS, (4) pembelajaran dalam bentuk kelompok dan meminimalisir metode ceramah, (5) evaluasi melalui *review* pembelajaran antar guru, supervisi dengan cara *face to face*, dan pelaksanaan ujian untuk peserta didik, (6) ditemukan hambatan pendistribusian UKBM yang terlambat dan (7) diselesaikan dengan *training* atau *workshop*, (8) *output* program antara lain peserta didik mampu lulus dalam jangka waktu dua tahun dan mampu bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi.

Kata kunci: manajemen, sistem kredit semester SMA

1. Pendahuluan

Perkembangan dalam bidang pendidikan setiap tahunnya terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman yang secara tidak langsung menuntut pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun berbagai macam komponen yang saling berkaitan satu sama lain dibidang pendidikan salah satunya yaitu kurikulum. Seiring perkembangan kurikulum, diciptakan sebuah sistem yang dapat menggali kemampuan minat dan bakat siswa serta untuk mengembangkan mutu pendidikan dengan diterapkannya Sistem Kredit Semester (SKS). Penyelenggaraan SKS sangat cocok diterapkan pada jenjang SMA/SMK/MA karena sistem tersebut dikaitkan dengan kurikulum yang diberlakukan 2013

yang diberlakukan di Indonesia saat ini dimana kurikulum tersebut menuntut untuk mempersiapkan peserta didik menjadi produktif dan kritis dalam berpikir.

SMAN 1 Probolinggo merupakan satu-satunya sekolah di Kota Probolinggo yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melaksanakan SKS. Sekolah sudah terlebih dulu memulai untuk menerapkan SKS dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebelum diberlakukan kurikulum 2013. Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Hidayah (2014) yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran pada SKS mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Selain itu, terdapat penelitian oleh Rostika dan Zulkarnain (2016) dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013 dengan SKS beserta faktor kekuatan dan kelemahan, faktor peluang dan tantangan serta dampak yang ditimbulkan dari implementasi kurikulum 2013 dengan SKS di SMAN 1 Batu.

Penerapan SKS mengharuskan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan secara matang perencanaan pembelajaran yang tidak hanya melihat dari sisi proses pembelajarannya saja tetapi juga dari sisi hasil lulusan dari penerapan sistem tersebut. Karena hal tersebut, kepala sekolah dan guru harus bisa mandiri ketika SKS akan diimplementasikan sehingga perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana sekolah bisa mengimplementasikan SKS tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran setiap semester pada satuan pendidikan. Hamalik (2003) mengemukakan bahwa SKS merupakan suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana siswa menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang akan diikuti setiap semester. Pelaksanaan SKS dengan kurikulum 2013 sangat cocok untuk diterapkan pada jenjang SMA, karena memuat kompetensi peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Secara umum, implementasi SKS dengan kurikulum 2013 meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implementasi SKS dengan kurikulum 2013 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan sumber daya pendidikan agar berlangsung secara optimal.

Peserta didik merupakan salah satu komponen yang ada dan turut berperan penting demi tercapainya keberhasilan tujuan pendidikan. Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuan, bakat minat yang dimiliki. anak yang memiliki kemampuan lebih dalam berpikir dapat meloncat sangat cepat dari urutan normal. Hal tersebut sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Gardner (2000) bahwa kecerdasan manusia tidak hanya dinilai dari skor, tetapi dapat dilihat dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menghasilkan permasalahan baru, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan penerapan SKS mengacu pada UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014, perencanaan SKS yang dilakukan oleh Waka Kurikulum dengan pemetaan pada seleksi peserta didik melalui tes akademik dan psikologi, pengorganisasian SKS dengan membentuk tim penanggungjawab SKS, pelaksanaan program SKS pada pembelajaran menggunakan bentuk kelompok dan meminimalisir metode ceramah, evaluasi melalui *review* pembelajaran antar guru, supervisi dengan cara *face to face*, dan pelaksanaan ujian untuk peserta didik, serta ditemukan hambatan pendistribusian UKBM yang terlambat dan

diselesaikan dengan *training* atau *workshop*, dan *output* program antara lain peserta didik mampu lulus dalam jangka waktu dua tahun dan mampu bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Melalui studi kasus deskriptif, peneliti bisa menggambarkan suatu fenomena yang terjadi mengenai manajemen SKS di SMAN 1 Probolinggo secara fokus dan mendalam sehingga data yang didapat kecil kemungkinan terhindar dari pemanipulasian data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dengan *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifications*. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara triangulasi data. Peneliti memperbanyak waktu penelitian agar dapat menelaah hasil temuan di lapangan. Yang terakhir yaitu menggunakan banyak informan agar data yang diperoleh diketahui tingkat objektivitasnya serta mengecek dengan bukti-bukti dokumen terkait penerapan SKS di SMAN 1 Probolinggo. Selain itu, peneliti menggunakan kecukupan bahan referensi yang digunakan sebagai bahan pendukung dan pembuktian data. Bahan referensi dalam penelitian ini antara lain foto, catatan lapangan dan transkrip wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Landasan Penerapan SKS di SMA

Lembaga pendidikan atau sekolah dalam menerapkan sebuah program atau sistem membutuhkan landasan atau payung hukum yang dapat menguatkan pelaksanaan program kedepan. Landasan penerapan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan SKS secara umum sama dengan yang digunakan oleh sekolah lain di Indonesia yang menerapkan SKS pertama kali yaitu SMAN 78 Jakarta yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan SKS di SMA.

3.1.2. Perencanaan SKS di SMA

Perencanaan pertama, agar sekolah dapat menjalankan program dengan baik dan berkualitas, dalam penyeleksian peserta didik benar-benar diatur dengan sistematis yang mengutamakan kemampuan peserta didik, tidak hanya mengandalkan nilai Ujian Nasional (UN) dari tingkat sebelumnya, tetapi dilihat dari peningkatan nilai peserta didik setiap semester dengan seleksi penerimaan peserta didik yang bekerjasama dengan lembaga psikologi dari kota Malang. Proses kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran juga disiapkan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh sekolah dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) terlebih dahulu. KRS yang sudah diisi oleh peserta didik, dikonsultasikan ke wali kelas atau pembimbing akademik (PA) untuk kemudian diserahkan ke waka kurikulum dan disetujui. Perencanaan dalam hal persiapan materi bahan ajar juga dipersiapkan secara matang oleh guru. Salah satunya adalah pembuatan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dan

RPP. Pembuatan UKBM ini biasanya dilakukan pada saat akhir semester dengan dipandu oleh koordinator SKS di sekolah.

3.1.3. Pengorganisasian SKS di SMA

Sekolah membentuk tim penanggungjawab SKS, Pembimbing Akademik (PA) atau disebut dengan wali kelas, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan disahkan dengan terbentuknya struktur organisasi yang jelas dan paten sehingga masing-masing individu mengerti tugas yang harus dilaksanakan selama tidak ada pergantian jabatan. Selain itu, sekolah juga mengatur pemilihan mata pelajaran yang sudah dipaketkan terlebih dahulu dan peserta didik tidak diperkenankan untuk memilih sendiri mata pelajaran yang akan mereka tempuh pada tiap semester. Adapun pendistribusian peserta didik yang berkemampuan cepat dan lambat tidak dibedakan, jadi sistemnya heterogen. Namun peserta didik yang memiliki kemampuan cepat mengikuti kelas percepatan pada kelas XI apabila mereka mampu menyelesaikan UKBM dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan teman-temannya yang lain.

3.1.4. Pelaksanaan SKS di SMA

Pembelajaran di SMA SKS berbeda dengan sekolah reguler lain yang tidak menerapkan SKS. Guru harus mampu melayani peserta didik yang berbeda kemampuannya dalam satu kelas. Guru tidak hanya fokus pada peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir cepat, tetapi juga kepada peserta didik yang lambat. Kalaupun ada peserta didik yang lambat, guru memiliki cara tersendiri untuk memberi pemahaman. Pembelajaran dikemas dengan cara guru membagi setiap peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka dalam bentuk kelompok dan meminimalisir metode ceramah. Sistem penentuan jam pelajaran yaitu 1 sks setara dengan 1 jam pelajaran (jp) dan 1 jp itu setara dengan 45 menit. Sedangkan untuk peserta didik yang mengikuti percepatan jam pelajarannya dibagi menjadi 30 menit.

3.1.5. Evaluasi SKS di SMA

Proses evaluasi pembelajaran SKS biasanya dilakukan antar guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengawasi guru lain sesuai dengan bidang mata pelajaran. Evaluasi tersebut biasa dilakukan setiap hari senin. Tetapi apabila kepala sekolah suatu waktu ingin mengetahui kinerja guru sudah profesional atau tidak, beliau langsung *face to face* dengan guru atau mengadakan diklat jika kinerja guru banyak yang belum profesional. Evaluasi tidak hanya dilakukan untuk guru, tetapi peserta didik juga dievaluasi dengan cara pelaksanaan ujian baik UTS ataupun UAS yang dilakukan bersamaan.

3.1.6. Hambatan Manajemen SKS di SMA

Hambatan terjadi pada manajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah mengenai kurangnya kesiapan guru untuk pelaksanaan SKS, sarana prasarana yang harus dibenahi untuk kenyamanan pembelajaran, pendistribusian UKBM yang masih belum merata meskipun sudah dipersiapkan sebelum pelaksanaan SKS dimulai, pengaturan mindset guru agar dapat mendesain kelas dengan baik agar pembelajaran tidak monoton dan kurangnya dana sekolah sehingga menghambat perbaikan sarpras yang ada di sekolah.

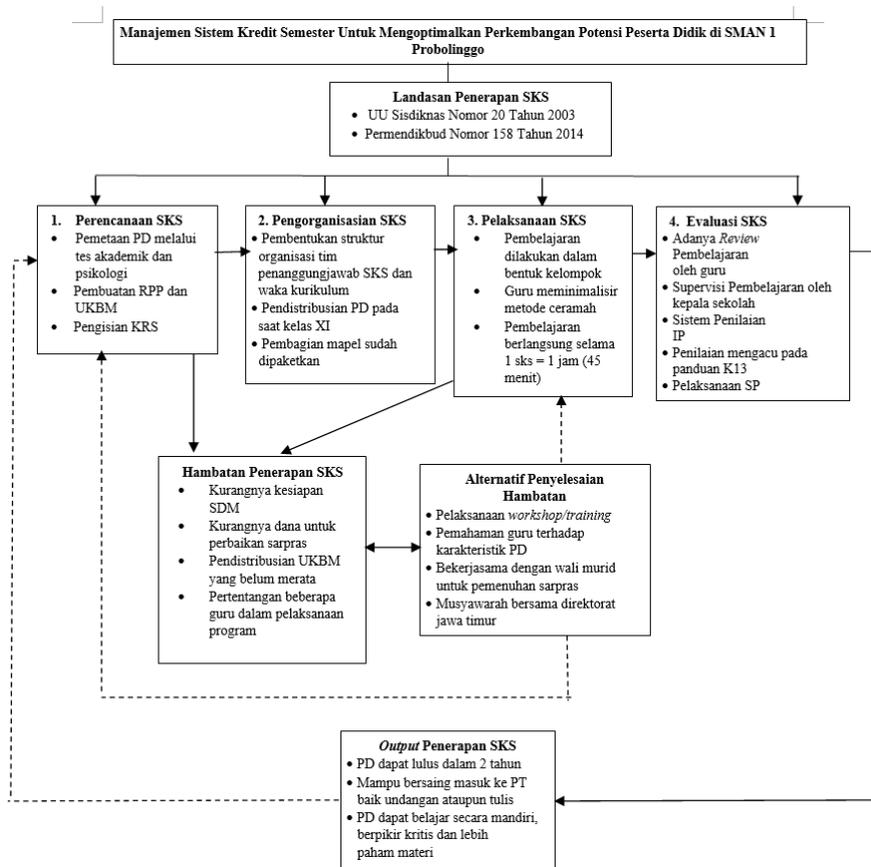
3.1.7. Alternatif Penyelesaian Hambatan Manajemen SKS di SMA

Alternatif penyelesaian hambatan manajemen SKS di SMA antara lain dengan melakukan pengadaan *training* atau *workshop* untuk meningkatkan kinerja guru, kemudian pematangan konsep tentang UKBM agar pendistribusian UKBM dapat berjalan dengan baik sesuai waktu dan kebutuhan peserta didik serta menjalin kerjasama dengan masyarakat atau wali murid untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah.

3.1.8. Output Penerapan SKS di SMA

Output dari penerapan SKS di SMA adalah lahirnya peserta didik yang berkualitas, mampu belajar secara mandiri, berpikir kritis, bersaing dengan perguruan tinggi favorit di Indonesia, menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dengan tidak hanya asal lulus cepat, tetapi benar-benar berkualitas dari segi akademik. Selain itu, dengan diterapkannya SKS peserta didik dapat menjadi lebih aktif, berpikir kritis, belajar mandiri, dan dapat menemukan cara belajar yang nyaman untuk diri sendiri sehingga mereka dapat menggali potensi dalam diri dengan bebas dan lebih paham dengan materi yang diberikan oleh guru.

Pada Gambar 1 dijelaskan hasil temuan penelitian mengenai keseluruhan manajemen SKS di SMA



Gambar 1. Temuan Penelitian Manajemen SKS di SMA

3.2. Pembahasan

3.2.1. Landasan Penerapan SKS di SMA

Penerapan SKS di SMA mengalami banyak perubahan-perubahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Sebelum SKS diterapkan, dibutuhkan pondasi yang kuat baik dari segi payung hukum ataupun dukungan dari seluruh pihak sekolah yang terlibat agar tujuan penerapan SKS dapat tercapai. Untuk melaksanakan program tersebut, sekolah tidak boleh sembarangan, selain harus ada Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh pemerintah, payung hukum juga dibutuhkan agar penerapan SKS dapat berjalan baik karena memiliki pedoman dalam pelaksanaannya.

Landasan penerapan SKS selain dengan berpedoman pada sekolah-sekolah yang pertama kali melaksanakan yaitu SMAN 78 Jakarta, sekolah juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan SKS pada sekolah menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, Neolaka (2017) menjelaskan bahwa landasan pendidikan merupakan pondasi atau dasar pijakan dalam praktik pendidikan. Jadi, landasan dalam pelaksanaan program pendidikan dibutuhkan agar memiliki pedoman dan dapat berjalan sesuai tujuan yaitu melayani peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan peserta didik yang lain agar mampu lulus lebih cepat dan berkualitas dalam jangka waktu dua tahun.

Kepala sekolah bersama direktorat jenderal pendidikan dengan dimotori oleh dinas provinsi jawa timur diberikan dukungan atau fasilitas untuk melaksanakan SKS dan itu dijadikan bahan pertimbangan sekolah dalam melaksanakan SKS di SMA pertama kali. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa payung hukum atau landasan yang digunakan di SMAN 1 Probolinggo sudah sesuai dengan teori dan kebijakan pemerintah.

3.2.2. Perencanaan SKS di SMA

Perencanaan SKS dimulai dengan proses seleksi peserta didik yang berbeda dari sekolah lain pada umumnya. Perbedaan tersebut ada pada tahap setelah peserta didik dinyatakan lolos pada tes akademik. Setelah peserta didik dinyatakan lolos, mereka mengikuti tes psikologi yang diadakan oleh sekolah yang bekerjasama dengan lembaga psikologi yang ada di Malang. Tes tersebut dilaksanakan sebagai acuan guru untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik apakah mereka mampu menyelesaikan pendidikan lebih cepat atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Prihatin (2011) bahwa manajemen peserta didik sebagai layanan untuk peserta didik di kelas dan luar kelas meliputi pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan kemampuan, minat sesuai kebutuhan di sekolah.

Proses perencanaan SKS di sekolah juga dilakukan oleh guru yaitu dengan membuat RPP dan UKBM untuk digunakan peserta didik selama satu semester. Pembuatan RPP dan UKBM tersebut dibimbing atau diberikan arahan oleh koordinator penanggungjawab SKS. UKBM berisi tentang soal-soal yang berlevel HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) yang digunakan sebagai alat evaluasi peserta didik sehingga harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Perencanaan yang dilakukan tersebut sesuai dengan pernyataan Darmadi (2009) yaitu

perencanaan persiapan mengajar bertujuan untuk mendorong guru agar lebih siap melaksanakan pembelajaran yang matang.

Peserta didik juga melakukan pemilihan mata pelajaran yang akan mereka tempuh selama satu semester dengan cara mengisi KRS secara manual dengan arahan dari wali kelas atau pembimbing akademik (PA) kemudian diserahkan kepada Waka Kurikulum untuk disetujui. Jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang ditempuh peserta didik sudah ditentukan oleh sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, Tirtarahardja dan Sulo (2005) menyatakan bahwa setiap individu itu unik, memiliki kemampuan berbeda, karena masing-masing memiliki aspek kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Oleh karena itu, pembagian beban belajar di SMA sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan peserta didik dalam menerima materi.

3.2.3. Pengorganisasian SKS di SMA

Pengorganisasian SKS dimulai dari terbentuknya tim penanggungjawab SKS yang berada dibawah naungan Waka Kurikulum. Kepala sekolah mengatakan bahwa pembentukan tim SKS dengan maksud agar pelaksanaan SKS berjalan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, Wijayanto (2012) menyatakan bahwa organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Adapun manajemen pendistribusian peserta didik dibagi sesuai dengan kecepatan belajar dan kemampuan. Guru memantau perkembangan peserta didik yang berkembang selama satu tahun untuk bisa memprediksi peserta didik yang dapat menyelesaikan program percepatan dan yang tidak. Setelah perkembangan dari peserta didik sudah muncul, maka diadakan tes untuk peserta didik yang ingin mengikuti kelas percepatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Imron (2015) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan, maka alat ukurnya juga berbeda dan alat ukur yang lazim digunakan untuk mengelompokkan peserta didik adalah dengan tes.

3.2.4. Pelaksanaan SKS di SMA

Pembelajaran dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi dengan metode ceramah kemudian peserta didik mencari atau memecahkan masalah sendiri meskipun sudah menerapkan kurikulum 2013 tetapi kebanyakan guru masih menerapkan metode ceramah seperti pada pembelajaran klasikal. Sedangkan pembelajaran dengan SKS ini berusaha meminimalisir metode ceramah dan mengajarkan kepada peserta didik agar dapat belajar mandiri sesuai dengan tujuan penerapan SKS. Guru harus beradaptasi terlebih dahulu namun guru dapat cepat menentukan strategi untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik yang ada pada masing-masing kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, Imron (2015) menyatakan bahwa adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda melahirkan pengaturan baru agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya.

3.2.5. Evaluasi SKS di SMA

Evaluasi di SMA tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi juga dilakukan oleh guru melalui kegiatan *review* pembelajaran oleh guru, *face to face* antara guru dengan kepala sekolah, sekaligus pelaksanaan UTS dan UAS sebagai alat ukur keberhasilan peserta didik

dalam pelaksanaan SKS. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Burhanuddin dkk (2007) bahwa pada pembinaan semacam rapat dewan guru itu yang diutamakan adalah dinamika kelompok yang produktif, setiap peserta rapat aktif untuk saling bertukar pikiran dan saling belajar satu sama lain. Sedangkan pernyataan mengenai evaluasi untuk peserta didik juga dijelaskan oleh Wiyono dan Sunarni (2009) bahwa tujuan utama evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan mengetahui keefektifan dan keefisienan mengajar guru. Teknik yang digunakan untuk pendukung evaluasi SKS tersebut adalah tes.

3.2.6. Hambatan Manajemen SKS di SMA

Hambatan yang terjadi di sekolah yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia seperti guru untuk melaksanakan SKS meskipun secara umum pelaksanaan SKS sudah baik. Selain itu hambatan terjadi pada kurangnya dana untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan pendistribusian UKBM yang tidak merata dan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga mengganggu peserta didik yang ingin menyelesaikan UKBM untuk dapat melanjutkan semester ataupun materi berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Busro dan Siskandar (2017) menjelaskan bahwa hambatan dapat terjadi apabila kendala yang berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan, dari guru, institusi atau lembaga serta kendala yang berasal dari peserta didik dan orangtua.

3.2.7. Alternatif Penyelesaian Hambatan Manajemen SKS di SMA

Alternatif yang dilaksanakan berupa pengadaan *training* atau *workshop* untuk meningkatkan kinerja guru, pematangan konsep tentang UKBM agar pendistribusian UKBM dapat berjalan dengan baik sesuai waktu dan kebutuhan peserta didik, serta meningkatkan partisipasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah. Sesuai dengan penjelasan Burhanuddin (1994) bahwa kepala sekolah harus memiliki kemampuan tinggi dibanding yang lain, dan persiapan dan pembinaan (*in service*) yang maksimal. Adapun penjelasan oleh Minarti (2011) bahwa usaha pengembangan ketenagaan pendidikan dilakukan dengan beberapa hal diantaranya pendidikan dan latihan (*inservice training*), tugas belajar, pemindahan wilayah, seminar, *workshop*, konferensi dan rapat dinas. Selain itu, Busro dan Siskandar (2017) juga menjelaskan bahwa cara untuk mengatasi kesulitan pada guru adalah pengembangan keprofesionalan guru dengan melakukan pertemuan intensif, melakukan musyawarah antar guru (MGMP), dan program pendampingan antar guru.

3.2.8. Output Penerapan SKS di SMA

Output dari penerapan SKS adalah melahirkan peserta didik yang berkualitas dan cepat dalam menyelesaikan studi di sekolah selama 2 tahun. Lulusan dikatakan berkualitas karena mampu bersaing untuk masuk di perguruan tinggi ternama di Indonesia baik melalui jalur undangan maupun tulis. Tidak hanya itu, peserta didik juga dapat berkembang potensi secara optimal melalui pembelajaran mandiri di kelas. Keberhasilan penerapan SKS tersebut, sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berkontribusi aktif dalam pembelajaran serta

memberikan porsi yang cukup untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

4. Simpulan

Kesimpulan penelitian terdiri dari 8 hasil temuan penelitian berikut. Pertama, landasan penerapan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan penyelenggaraan SKS diatur sesuai Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014. Kedua, perencanaan SKS di SMA adalah melakukan pemetaan pada seleksi peserta didik melalui tes akademik dan psikologi yang bekerjasama dengan lembaga psikologi dari Malang, perencanaan juga dilakukan oleh pihak guru dengan mempersiapkan RPP dan pembuatan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) sebagai alat evaluasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan perencanaan yang dilakukan oleh peserta didik sebelum menerima pelajaran adalah melakukan pengisian KRS yang dipandu oleh pembimbing akademik (PA) kemudian disetujui oleh Waka Kurikulum. Ketiga, pengorganisasian SKS di SMA yaitu terbentuknya tim penanggungjawab SKS dan pendistribusian peserta didik yang berkemampuan cepat dilakukan pada kelas XI serta pembagian mata pelajaran sudah ditentukan. Keempat, pelaksanaan SKS di SMA yaitu pembelajaran dalam bentuk kelompok dan meminimalisir metode ceramah. Kelima, adalah evaluasi SKS yang dilakukan adalah dengan kegiatan *review* pembelajaran antar guru, supervisi yang dilakukan kepala sekolah dengan cara *face to face*, dan pelaksanaan ujian untuk peserta didik. Keenam, hambatan yang terjadi pada penerapan SKS adalah kurangnya kesiapan beberapa guru dalam menerapkan program SKS, pendistribusian UKBM yang telat dan tidak merata serta kurangnya dana sekolah untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Ketujuh, alternatif penyelesaian yang dilakukan adalah pelaksanaan *training* atau *workshop* untuk meningkatkan kesiapan dan kinerja guru, serta lebih menekankan kepada guru agar mampu memahami karakteristik peserta didik di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kedelapan, *output* penerapan SKS adalah melahirkan peserta didik yang mampu lulus dalam jangka waktu dua tahun, peserta didik mampu bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia baik melalui jalur undangan ataupun tulis, kemudian dari penerapan SKS tersebut peserta didik dapat belajar mandiri, berpikir kritis, lebih paham materi, dan mampu menciptakan cara belajar yang nyaman sesuai kemampuan mereka.

Daftar Rujukan

- Burhanuddin, Soetopo, H., Imron, A., Maisyaroh., Ulfatin, N. (2007). *Supervisi Pendidikan dan Pengajaran: Konsep Pendekatan, dan Penerapan Pembinaan Profesi*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Busro M, & Siskandar. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Darmadi, H. (2009). *Kemampuan Dasar Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Gardner, H. (2000). *Multiple Intelegences: Teori dan Praktek*. Bata: Intraksa.
- Hidayah, L. (2014). *Manajemen Pembelajaran pada Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 2 Malang*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Imron, A. (2015). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Neolaka, A. (2017). *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamalik, O. (2003). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Online), (<http://peraturan.go.id>), diakses pada 12 Februari 2019.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. (Online), (<http://Bsnp-indonesia.org>), diakses 29 November 2017.
- Prihatin, E. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Rostika, D. & Zulkarnain, W. (2016). Analisis Implementasi Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester di SMAN 1 Batu. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 25*(2), 191-199.